

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan pada hak pemegang hak atas tanah eigendom untuk mendapatkan hak setelah habisnya waktu sebagaimana keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa konversi tanah eks hak barat berakhir sejak tanggal 24 September 1980, akibatnya hak atas tanah tersebut menjadi tanah negara. Selama bidang tanah tidak digunakan oleh negara untuk kepentingan umum pemegang hak dapat langsung mengajukan permohonan hak atas tanah eks hak barat atau pihak yang secara fisik menempati tanah beserta bangunannya. Penguasaan ahli waris atas bangunan yang berdiri di atas tanah negara eks *eigendom*, berdasarkan ketentuan Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 beserta surat keterangan waris. Penolakan pengajuan permohonan hak eks *eigendom* oleh Kantor Pertanahan dengan alasan tidak adanya buku/kartu *eigendom* di Kantor Pertanahan, tidak berdasarkan hukum karena buku/kartu *eigendom* berada di Kantor Pertanahan sebagai bukti satu-satunya dan persyaratan ini juga tidak tercantum dalam ketentuan Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997.

Kata kunci: Tanah eigendom, hak atas tanah, konversi, kantor pertanahan

ABSTRACT

This study focuses on the rights of holders of land rights eigendom to get the right decision after the expiration of time as the Decree of President Republic Indonesia Number 32 Year 1979 on the Principles of Policy In Order Granting Rights to Land Origin New Conversion Rights West.

This study showed that the conversion gain land rights of ex west end since 24 September 1980, as a result of the land rights to state land. As long as the ground plane is not used by the state for public use rights holders can directly apply for rights to land west of ex-rights or any person physically occupying the land and the building. Mastery of the building standing on the land of former state eigendom by heirs, under the provisions of Article 24 of Regulation No. 24 of 1997 along with a certificate of inheritance. Rejection of application for rights of ex eigendom by the Land Office, citing a lack of books / cards eigendom in the Land Office, not under the law because the book / card eigendom are in the Land Office as proof sole and these requirements are also not included in the provisions of Article 24 of Regulation No . 24 of 1997.

Keywords: Eigendom land, land rights, conversion, land office